

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU  
INDONESIAPINTAR (KIP) DI SD NEGERI 034  
TENGGARONG KELURAHAN JAHAB KECAMATAN  
TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Mada Sulhe, Kus Indarto**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 4, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Penerapan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 034 Tenggarong Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Mada Sulhe

NIM : 1902016093

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 12 Desember 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Kus Indarto, M.AP.**  
**NIP 19740401 200604 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>
<b>Volume</b>	<b>: 13</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 4</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 2025</b>
<b>Halaman</b>	<b>: 1084-1096</b>

# EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SD NEGERI 034 TENGGARONG KELURAHAN JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mada Sulhe <sup>1</sup>, Kus Indarto <sup>2</sup>

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar KIP di SD Negeri 034 Tenggarong Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan pentingnya Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, efektivitas penerapan program ini masih perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Landasan teori yang digunakan dengan menggunakan lima ukuran Efektivitas Program sebagai berikut pemahaman Program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Untuk mendapatkan data yang tepat penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan pelaksanaan program dan data primer berupa wawancara dengan informan penerima KIP, orang tua bahkan guru di sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya Efektif mengatasi masalah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih keterlambatan pencairan dana dan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada orang tua siswa. Namun ada beberapa hal yang dapat dikatakan efektif yaitu Pelayanan pendidikan sama rata dalam proses pembelajaran sehingga siswa/i dapat mengembangkan potensi diri mereka Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Program KIP di SD Negeri 034 Tenggarong cukup efektif, namun masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis, administrasi, dan komunikasi agar manfaat program dapat lebih optimal.*

**Kata Kunci :** Efektif, Program KIP, Pendidikan SDN 034 Tenggarong Kutai Kartanegara

## **Pendahuluan**

Besar kecilnya kemampuan seseorang untuk menghadapi kehidupan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Manusia dapat menjadi lebih dewasa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [madasulhe14@gmail.com](mailto:madasulhe14@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dalam perkembangan kognitif, emosional, dan psikomotoriknya melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dan praktik. Pada hakekatnya, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai, menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual yang menjadi ciri aktivitas seseorang dalam kehidupan, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui penyelesaian tugas belajar, mengembangkan kebiasaan, dan berpartisipasi aktif. sering terlibat dalam pengejaran pendidikan untuk menghabiskan waktu .

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun dan penyediaan akses pendidikan dari tingkat TK hingga SMA. Upaya ini diarahkan agar seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala usia, lokasi, maupun waktu. Salah satu inisiatif untuk memperluas akses tersebut adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat bersekolah dengan layak dan menjadi generasi yang lebih baik (Sari dkk.2021)

Banyak siswa di Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, meskipun pendidikan merupakan hal penting bagi masyarakat dan Indonesia terus berupaya memajukannya (Madaniah, 2023). Namun, berbagai persoalan masih menghambat pencapaian tujuan pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Permasalahan makro mencakup ketidaksesuaian kurikulum, ketidakmerataan pendidikan, penempatan guru yang kurang tepat, rendahnya kualitas guru, serta biaya pendidikan yang tidak murah. Sementara itu, permasalahan mikro meliputi metode pembelajaran yang monoton, fasilitas terbatas, dan rendahnya prestasi siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi ditawarkan, antara lain pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan prestasi belajar siswa (Nurhuda, 2022).

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Salah satu program unggulan tersebut adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Hermawan, 2025).

Program KIP ini berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Sosial, serta Kebudayaan. Program Kartu Indonesia Pintar diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Program Indonesia Pintar. Bantuan ini berupa dana tunai, peningkatan akses, dan peluang belajar dari pemerintah yang disalurkan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendukung pendidikan dan menurunkan atau

mencegah angka putus sekolah, serta membantu siswa yang telah putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan formal dan nonformal (Nurhuda, 2022).

Sebagian siswa tersebut berasal dari rumah yang memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Adapun persyaratan atau data yang harus di lengkapi yang perlu diperhatikan pada saat mengurus KIP :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM apabila tidak memiliki KKS
4. Rapor hasil belajar siswa
5. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah

Langkah – langkah untuk daftar KIP yang perlu di perhatikan oleh peserta didik saat mendaftar yaitu :

Pelaksanaan Proses Pendaftaran Siswa dapat dilakukan dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke sekolah atau lembaga pendidikan yang terdekat. Apabila belum memiliki KKS, orang tua harus mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada RT/RW dan Kelurahan/Desa sebelumnya untuk memenuhi syarat pendaftaran.

Pengajuan Calon Penerima Setelah itu, pihak sekolah atau madrasah akan melakukan pencatatan data calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat atau Kementerian Agama.

Pendaftaran dan Seleksi Dapodik Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kementerian Agama mengirimkan data/rekapitulasi pengajuan calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Nantinya, pihak sekolah akan mendaftarkan calon peserta KIP ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib memasukkan data calon penerima KIP ke dalam Dapodik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama akan mengirimkan KIP kepada calon penerima KIP yang lolos seleksi. Ada pun kewajiban setiap peserta didik yang menerima dana KIP yaitu :

1. Menyimpan dan menjaga KIP dengan baik.
2. KIP merupakan bantuan pendidikan. dana manfaatnya harus digunakan untuk keperluan yang relevan.
3. Terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Kalimantan berkomitmen menyajikan informasi yang transparan untuk masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 mencapai 734. 485 orang. Jika dilihat dari sebaran populasi, penduduk cenderung terkumpul di area perkotaan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Tenggarong, yang memiliki angka 14,78 persen. Tingkat kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 56,28 orang per km<sup>2</sup>. Jika dianalisis

berdasarkan kepadatan penduduk per kecamatan, Kecamatan Tenggarong mencatat kepadatan tertinggi sebesar 272,64 orang per km<sup>2</sup>, dan Desa Jahab di Kecamatan Tenggarong memiliki total penduduk sekitar 4. 679 orang, menurut data DKB Semester 2 Tahun 2021.

Kelurahan Jahab terdapat 3 SDN yaitu SDN 024 Tenggarong dengan jumlah peserta didik 264 ditahun 2021/2022, SDN 030 Tenggarong dengan jumlah peserta didik 180 ditahun 2021/2022 dan SDN 034 Tenggarong jumlah peserta didik paling kecil di tahun 2021/2022 di Kelurahan Jahab berjumlah 123 peserta didik dan penerima KIP berjumlah 15 orang / Peserta Didik.

Berdasarkan observasi awal, masalah di lapangan antara lain: pertama, masi banyak anak yang harusnya mendapatkan Kartu Indonesi Pintar terhalang karena belum mendata ulang pihak sekolah. Kedua, orang tua tidak mengetahui kapan dana KIP cair, padahal anak mereka memegang KIP. informasi pencairan ke bank. dan ketiga, dana yang diterima oleh siswa disalahgunakan oleh orang tua untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bukan peralatan sekolah. selain itu masih kurang SDM yang menangani KIP karena kurangnya Tenaga Kerja sehingga yang menangani KIP tersebut adalah Guru mengajar serta merangkap menjadi Administrasi di SDN 034 Tenggarong tersebut.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Efektivitas***

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang mengandung arti seperti berhasil, ditaati, berdampak kuat, manjur, atau membawa keberuntungan. Dari beragam makna tersebut, istilah ini paling tepat dipahami sebagai keberhasilan dalam melaksanakan suatu hal dengan baik. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai penggunaan yang tepat, berguna, atau mendukung tercapainya tujuan. Secara umum, efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil aktual yang diperoleh (Fitria, 2024).

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Handoko (2003) memaknai efektivitas sebagai “melakukan pekerjaan yang benar,” yaitu memilih pekerjaan yang tepat dan memusatkan sumber daya untuk menyelesaikannya. Sementara itu, Siagian (2001) menekankan efektivitas sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana secara sadar dan terencana agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Dapat disimpulkan efektivitas merupakan ukuran penting untuk menilai optimalnya kinerja suatu organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

### ***Ukuran Efektivitas***

Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi dapat dilihat dari berbagai indikator seperti kualitas, produktivitas, efisiensi,

pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, serta kemampuan beradaptasi. Ukuran efektivitas program meliputi kejelasan tujuan dan strategi, ketepatan sasaran, ketersediaan sarana prasarana, serta efektivitas pelaksanaan dan individu yang menjalankan kebijakan.

Duncan dalam Steers menjelaskan tiga ukuran efektivitas utama, yaitu: (1) pencapaian tujuan, yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi target; (2) integrasi, yaitu kemampuan organisasi menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak; dan (3) adaptasi, yakni kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Menurut Sutrisno dalam Jannah (2016), efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu pelaksanaan, tercapainya tujuan program, serta adanya perubahan nyata bagi penerima manfaat. Pemahaman masyarakat menunjukkan sejauh mana tujuan program dimengerti, ketepatan sasaran memastikan bantuan diterima pihak yang benar, ketepatan waktu mendukung pengelolaan dana yang sesuai aturan, pencapaian tujuan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan, dan perubahan nyata mencerminkan dampak positif program bagi penerima.

#### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas***

Efektivitas suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Sutrisno (2011), terdapat empat kelompok faktor utama, yaitu: (1) struktur dan sistem organisasi yang jelas, (2) kondisi lingkungan internal dan eksternal, (3) karakteristik karyawan seperti kemampuan dan motivasi kerja, serta (4) kebijakan manajerial yang tepat dalam perencanaan dan pengawasan.

Gibson et al. (1992) menambahkan bahwa efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres kerja individu. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana seseorang dapat berperan optimal dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi.

#### ***Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)***

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang diluncurkan pada 3 November 2014 sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak usia 6–21 tahun dari keluarga kurang mampu. KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan menjadi instrumen utama dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun.

KIP berfungsi sebagai identitas resmi penerima bantuan pendidikan, yang dapat digunakan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sejak diluncurkan, jumlah penerima KIP terus meningkat, dari 15 juta siswa pada 2015 menjadi lebih dari 19 juta siswa dengan tingkat penyaluran mencapai 100%. Melalui KIP, pemerintah berupaya mengurangi angka putus sekolah dan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kebijakan nasional untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar tetap bersekolah, mencegah putus sekolah, dan memenuhi kebutuhan belajar. Kebijakan ini berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini dapat digunakan untuk transportasi, perlengkapan sekolah, dan uang saku. Meskipun bertujuan pemerataan pendidikan, program ini masih menghadapi kendala ketepatan sasaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015, KIP merupakan bantuan tunai bagi siswa dari keluarga miskin, sebagai penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan diperuntukkan terutama bagi anak dari keluarga pemegang KPS atau KKS.

#### ***Tujuan Kartu Indonesia Pintar***

Sebagai upaya dalam menunjang masalah pendidikan usia anak di Indonesia adalah menjalankan program pendidikan, program pendidikan yang dimaksud adalah program KIP. KIP memiliki tujuan sebagai berikut;

- a. Menjangkau dan menunjang anak usia 6-12 tahun terhadap pelayanan pendidikan program KIP hingga menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam program Wajib 12 tahun belajar.
- b. Mencegah anak atau peserta didik yang akan dan sudah putus sekolah yang disebabkan terkendala ekonomi keluarga.
- c. Mencari dan mendorong anak atau peserta didik yang telah putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali pendidikan yang telah terputus sebagai akses memberikan hak sebagai warga negara.

#### ***Prioritas Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar***

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan secara merata. Sasaran utama penerima KIP meliputi: (1) keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS); (2) anak usia sekolah dari jenjang SD (6–12 tahun), SMP (13–15 tahun), SMA/SMK (16–18 tahun), hingga mahasiswa (19–21 tahun); (3) anak yatim piatu yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan; serta (4) anak yang terdampak bencana alam. Dengan sasaran yang terukur tersebut, diharapkan bantuan pendidikan melalui KIP tepat guna dan tepat sasaran bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong. Metode deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran sistematis dan menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi secara alami tanpa adanya

perlakuan atau manipulasi variabel (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis pelaksanaan program berdasarkan data empiris di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu kepala sekolah sebagai key informan, serta guru, orang tua siswa penerima, dan siswa penerima KIP sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk menggali informasi mendalam tentang pelaksanaan program KIP. Observasi digunakan untuk mengamati langsung situasi di lapangan guna memperoleh data faktual, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data dari sumber tertulis seperti arsip dan laporan sekolah.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara terus-menerus selama penelitian hingga data dinilai jenuh. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi penting agar lebih bermakna, penyajian data disusun dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pola serta temuan yang muncul dari hasil analisis.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Efektifitas Penerapan Program KIP***

Efektivitas penerapan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diukur dari sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pembiayaan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan dan memperoleh pendidikan yang layak. Berikut beberapa aspek penerapan program KIP, diantaranya;

#### ***Pemahaman Program KIP***

Pemahaman Program Menurut Sutrisno dalam jannah (2016) Pemahaman program ini dapat dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong telah berjalan sejak tahun 2016 dan dinilai cukup efektif meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman di kalangan penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah memahami bahwa KIP merupakan bantuan pemerintah bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung biaya pendidikan. Namun, beliau menilai bahwa sosialisasi program masih kurang dan berharap agar pelaksanaannya dilakukan langsung oleh pihak pengelola KIP agar orang tua memahami lebih jelas tujuan dan mekanisme program tersebut. Operator sekolah menjelaskan bahwa KIP bertujuan mencegah anak putus sekolah, dan dirinya ditugaskan menjalankan

peran sebagai operator untuk mengelola administrasi serta pelaksanaan program di sekolah.

Sementara itu, dari sisi orang tua siswa, mereka menilai bahwa program KIP sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anak. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi dan informasi terkait proses pencairan dana yang seringkali menyebabkan keterlambatan. Mereka berharap adanya peningkatan komunikasi dan pendampingan dari pihak sekolah agar dapat memahami hak, kewajiban, serta pemanfaatan dana dengan lebih baik. Adapun hasil wawancara dengan siswa penerima KIP menunjukkan bahwa sebagian besar hanya mengetahui bahwa mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi belum memahami secara pasti mengenai penggunaan dan mekanisme penyaluran dana tersebut.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015. Program ini merupakan pengembangan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang diberikan kepada anak dari keluarga penerima KPS atau KKS agar dapat melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun.

Namun, hasil penelitian di SD Negeri 034 Tenggarong menunjukkan bahwa pemahaman terhadap program KIP masih belum optimal. Sebagian responden mengetahui fungsi umumnya, tetapi belum memahami secara rinci mekanisme pencairan dan pelaporan penggunaan dana. Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait menyebabkan sebagian orang tua dan siswa menganggap KIP sebagai bantuan tunai bebas penggunaan. Meskipun pihak sekolah telah memahami tujuan dan prosedur program dengan baik, pemahaman orang tua dan siswa masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar sekolah dan dinas terkait memperkuat sosialisasi serta pendampingan melalui rapat, brosur, atau penyuluhan agar seluruh pihak memahami dengan benar tujuan dan mekanisme pelaksanaan program KIP.

### ***Tepat Sasaran Program KIP***

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, meskipun sudah berjalan cukup baik dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Mengacu pada pendapat Sutrisno dalam Jannah (2016:4), *tepat sasaran berarti sejauh mana tujuan program benar-benar terwujud atau menjadi kenyataan*. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan telah diterima oleh siswa yang membutuhkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang mengganggu ketepatan sasaran.

Beberapa siswa yang seharusnya berhak belum terdaftar dalam DTKS sehingga tidak bisa menerima bantuan, sementara ada juga penerima yang kondisi ekonominya telah meningkat tetapi belum dievaluasi ulang. Selain itu, proses pendataan dan verifikasi melalui Dapodik dan DTKS masih menghadapi kendala administrasi dan kurangnya koordinasi dengan orang tua. Sosialisasi terkait mekanisme pengajuan ulang dan pemanfaatan dana KIP juga belum optimal.

Meskipun demikian, dana yang diterima umumnya digunakan sesuai peruntukan seperti pembelian perlengkapan sekolah dan biaya transportasi, serta dinilai bermanfaat dalam menurunkan risiko putus sekolah dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan demikian, program KIP di SDN 034 Tenggarong sudah mengarah pada ketepatan sasaran, namun masih perlu perbaikan pendataan, evaluasi kelayakan, dan sosialisasi agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang memenuhi kriteria.

#### ***Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program KIP***

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong secara umum telah berjalan dengan baik, namun dari aspek ketepatan waktu masih belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses administrasi dan verifikasi data yang panjang, kendala teknis pada sistem dan rekening penerima, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat seperti sekolah, dinas pendidikan, dan bank penyalur. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan operator, keterlambatan pencairan dana sering kali terjadi karena validasi data dari pusat membutuhkan waktu yang lama.

Menurut Sutrisno dalam Jannah (2016:4), ketepatan waktu pelaksanaan program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian, keterlambatan pencairan dana KIP menunjukkan bahwa efektivitas waktu dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Dampak dari keterlambatan ini menyebabkan siswa tidak dapat segera menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pendidikan awal seperti pembelian buku dan seragam.

Meskipun demikian, pihak sekolah tetap melaksanakan perannya dengan baik melalui pendampingan, transparansi informasi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima bantuan. Masyarakat dan orang tua siswa juga memahami bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pihak sekolah, melainkan faktor eksternal dari sistem nasional. Secara keseluruhan, Program KIP di SDN 034 Tenggarong sudah tergolong baik dalam aspek pelaksanaan dan manfaatnya, namun masih perlu peningkatan dalam hal ketepatan waktu pencairan agar manfaatnya lebih optimal bagi peserta didik.

#### ***Tercapainya Tujuan Program KIP***

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Program ini bertujuan mendukung pemerataan kesempatan belajar dan mencegah anak dari keluarga kurang mampu putus

sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, operator, orang tua, dan siswa SDN 034 Tenggarong, diketahui bahwa tujuan utama program KIP telah tercapai. Para penerima bantuan merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, seragam, dan alat tulis. Selain itu, siswa penerima KIP mendapatkan pelayanan yang setara tanpa adanya diskriminasi dari pihak sekolah.

Menurut Sutrisno dalam Jannah (2016:4), tercapainya tujuan program dapat diukur dari sejauh mana pelaksanaan program mampu memenuhi sasaran yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari meningkatnya motivasi belajar siswa, berkurangnya risiko putus sekolah, serta adanya peningkatan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

Program KIP di SDN 034 Tenggarong juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa penerima KIP berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Saras Setyawati (2018) yang menyatakan bahwa KIP berperan penting dalam meningkatkan partisipasi siswa karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa Program KIP di SDN 034 Tenggarong telah mencapai tujuannya dalam meringankan beban biaya pendidikan, meningkatkan akses dan kesetaraan layanan pendidikan, serta mendorong motivasi belajar siswa. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek validasi data penerima, sosialisasi mekanisme pencairan, dan pengawasan penggunaan dana agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

#### ***Perubahan dengan adanya Program KIP***

Perubahan dalam penelitian ini diukur berdasarkan sejauh mana program memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian di SD Negeri 034 Tenggarong menunjukkan bahwa Program KIP telah memberikan perubahan yang signifikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan operator menilai bahwa beasiswa KIP meringankan beban biaya pendidikan, membantu pemenuhan sarana belajar, serta meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Orang tua penerima manfaat merasakan dampak langsung berupa berkurangnya beban ekonomi keluarga, sementara anak-anak menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Para siswa juga menunjukkan perubahan positif berupa peningkatan kehadiran, kedisiplinan, dan pengembangan potensi diri.

Mengacu pada pendapat Sutrisno dalam Jannah (2016), perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan Program KIP—yaitu meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak

mampu—telah mulai *menjadi kenyataan*. Dengan demikian, secara umum Program KIP di SDN 034 Tenggarong efektif dalam menciptakan kondisi baru yang lebih baik, sejalan dengan amanat UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, serta Permendikbud No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

### ***Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar KIP di SD Negeri 034 Tenggarong***

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi tingkat efektivitas program. Faktor pendukung merupakan segala kondisi dan sumber daya yang membantu keberhasilan program, sedangkan faktor penghambat adalah kendala atau hambatan yang memperlambat pencapaian tujuan program.

#### ***Faktor Pendukung***

Adanya kebijakan sekolah yang menerapkan pelayanan pendidikan sama rata pihak sekolah SDN 034 Tenggarong berhasil meniadakan diskriminasi, menciptakan rasa kesetaraan, dan memungkinkan siswa penerima KIP mengembangkan potensi diri secara maksimal. Terpenuhinya fasilitas pendidikan yang difasilitasi oleh dana KIP secara langsung meningkatkan keaktifan, motivasi, dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. karena tidak lagi terbebani oleh kekurangan perlengkapan sekolah

#### ***Faktor Penghambat***

a)Belum optimalnya pendataan penerima KIP. Masih terdapat ketidaktepatan dalam pendataan siswa penerima KIP, di mana beberapa siswa yang seharusnya berhak belum menerima bantuan, sementara ada pula yang sudah tidak tergolong keluarga kurang mampu masih tercatat sebagai penerima. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan ulang secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan fokus pada siswa yang sangat membutuhkan. b) Kurangnya kesadaran dan kelalaian orang tua serta siswa dalam penggunaan dana KIP. Sebagian orang tua dan siswa masih belum memanfaatkan dana KIP sesuai tujuan utamanya, yaitu untuk kebutuhan pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah terkadang digunakan untuk keperluan lain, sehingga manfaat program menjadi kurang optimal dalam menunjang kegiatan belajar siswa. c) Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana KIP. Pelaporan penggunaan dana KIP masih belum dilakukan secara transparan. Sering kali siswa atau orang tua tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana seperti kuitansi pembelian kebutuhan sekolah, sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut. Kondisi ini menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan program

Faktor-faktor tersebut sejalan dengan temuan penelitian Setyawati (2018) dan Pulungan (2020) yang menunjukkan bahwa kurangnya akurasi data, lemahnya pengawasan, serta minimnya sosialisasi menjadi hambatan umum dalam pelaksanaan Program KIP di berbagai daerah. Dengan demikian,

diperlukan peningkatan sistem pendataan, pengawasan penggunaan dana, serta penguatan literasi dan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah agar program KIP dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 034 Tenggarong, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar hasilnya lebih optimal. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, kesetaraan akses pendidikan, serta penurunan risiko putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan bantuan.

### ***Saran***

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan diharapkan melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap siswa penerima KIP agar bantuan benar-benar diberikan kepada yang berhak. Pemerintah juga perlu menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan serta mudah diterapkan oleh sekolah.
2. Bagi Pihak Sekolah sekolah perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada orang tua dan siswa mengenai tujuan serta tata cara penggunaan dana KIP yang benar. Selain itu, sekolah perlu membuat mekanisme pelaporan sederhana dan transparan agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan baik.
3. Bagi Orang Tua dan Siswa diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan dana KIP. Dana tersebut hendaknya diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi, bukan untuk kebutuhan di luar sekolah.
4. Sekolah dan pihak terkait perlu menyediakan sistem pengawasan/tim audit pelaporan dana KIP yang lebih transparan Hal ini akan meningkatkan tanggung jawab dan mengurangi potensi ketidaksesuaian penggunaan dana.

## **Daftar Pustaka**

- Abram, A. A. (N.D.). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Smk Negeri 1. Implementation, Program Indonesian Smart, Smart Indonesian Card.
- Aziz, A. R. (2019). Implementasi Instruksi Presiden ( Inpres ) No 07 Tahun 2014 Tentang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global, Volume 04 No. 02 Januari 2019, 58-68.

- Cahyaningsih, R. I. (2018). Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip). *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Issn : 24775673, Volume Iv Nomor 1, Juli 2018, 147-162.
- Djoyosuroto, R. S. (, Januari–Maret 2018,). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip). *Policy Of Implementation, Smart Card Indonesia, Management*, Volume 1, Nomor 1, 15-30.
- Fitria, Kholida (2023), Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau] repository. UIN Suska. <http://repository.uin-suska.ac.id>
- Handoko, T. Hani, 2003, Manajemen (Edisi), BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hermawan, R., Wulandari, N. P., Magfiroh, V. S., & Hilman, C. (2025). Peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat. *Journal of Islamic Religious Education (JoIRE)*, 1(3), 108.
- Jannah, F.Sivia. 2016. Efektivitas Program Siaran Radio Suara Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang). *Jurnal Unesa*. Volume 4. Nomor 3
- Khusnaini Dan Rusman, M.Pd.I (2015) Efektifitas Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Proses, Product) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMP Jati Agung Wage Sidoarjo, [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya], repository.um- surabaya.ac.id/1662/3/SKRIPSI
- Lukman, Arif (2018) Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Di Universitas Negeri Jakarta [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta], etheses.iainkediri.ac.id/1011/3/9210101
- Madaniah, F., Mutakin, M., Nurjannah, S., Darpin, D., & Suryandari, M. (2023). Sebab akibat banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. *Student Research Journal*, 1(1), 418–424.
- Mauliana Sari. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 3, No. 1, Februari 2021, 43-53.
- Nawawi, Hadari. 1991. Metodologi Penelitian Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nurain, Riski Yunani (2018) Evaluasi Kurikulum 2013 Model CIPP pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SDN Kandat. [Thesis Magister, IAIN Kediri] etheses.iainkediri.ac.id/1011/3/9210101
- Rohaeni, N. E. (N.D.). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). 2018 June, Volume 2 Number 1, 194-204.
- Siagian, Sondang. P, 2003, Manajemen Personalia, Pustaka Umum, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.